



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBERIAN MAKAN MINUM TAMU/ACARA/KEGIATAN KEPALA DAERAH,  
WAKIL KEPALA DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kedinasan, dipandang perlu memberikan makan minum tamu/acara/Kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa pemberian makan minum tamu/acara/Kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin belum diatur di dalam pedoman umum, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Makan Minum Tamu/Acara/Kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Makan Minum Tamu/Acara/Kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, dengan besaran biaya sesuai dengan harga pasar dan sesuai dengan kebutuhan disertai dengan bukti pembayaran/bentuk lainnya yang sejenis.
- KEDUA : Adapun jenis dari belanja makan minum tamu/acara/kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. bahan-bahan makanan dan minuman (Sembako, kue, buah-buahan, air kemasan, air mineral dll);
  2. snack kotak;
  3. nasi kotak/bungkus;
  4. snack prasmanan;
  5. sajian prasmanan/joglo; dan
  6. sajian di warung, rumah makan, cafe, restoran dan sejenis lainnya.
- KETIGA : Belanja makan minum tamu/acara/Kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibedakan berdasarkan sebagai berikut:
1. Tamu VVIP
    - a. Presiden Republik Indonesia;
    - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
    - c. Pejabat Pusat Setingkat Menteri; dan
    - d. Gubernur.
  2. Tamu VIP
    - a. Walikota; dan
    - b. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
  3. Tamu Umum
    - a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
    - b. Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri);
    - c. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dll; dan
    - d. Masyarakat Umum.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Pemberian Makan Tamu/Acara Walikota/Wakil Walikota Pemerintah Kota Banjarmasin dinyatakan Dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA